



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DINAS KESEHATAN



Jl. Jend. Sudirman No Km 2 Telp (0746) 21226 Fax. 21204

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 01 TAHUN 2025**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar;
- b. bahwa Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan ketersediaan data mengenai penduduk sebagai sasaran program pembangunankesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Indikator Kinerja bidang kesehatan untuk Kabupaten Merangin Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun2002-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025,**
- KESATU :** Indikator Kinerja bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
- KEDUA :** Capaian indikator kinerja program digunakan sebagai dasar penetapan pencapaian kinerja di Puskesmas;
- KETIGA :** Indikator Kinerja Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai mana terlampir;
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di, Bangko,
Pada Tanggal, 2 Januari 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MERANGIN**

drg. H. SONY PROPE SMA, M.Ph
NIP :19711012200212 1004



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN MERANGIN**

NOMOR : 01 TAHUN 2025

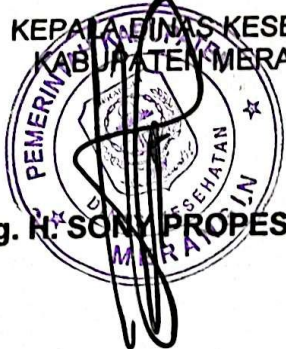
**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA BIDANG
KESEHATAN TAHUN 2025**

NO	INDIKATOR PROGRAM	TARGET(%)
1.	Persentase Ibu Hamil ANC K1	100%
2	Persentase Ibu Hamil ANC 4 kali	100%
3	Persentase Ibu Hamil ANC 6 kali	100%
4	Persentase ibu hamil ANC Trimester 1 dengan USG (K1)	100%
5	Persentase Ibu hamil ANC Trimester 3 dengan USG (K5)	100%
6	Persentase ibu hamil kurang energi kronik	10%
7	Persentase ibu hamil KEK mendapat tambahan asupan gizi	90%
8	Persentase Ibu Hamil KEK mengonsumsi tambahan asupan gizi	90%
9	Cakupan Ibu Hamil mendapat TTD selama masa kehamilan minimal 90 Tablet	90%
10	Cakupan Ibu Hamil yang mengonsumsi TTD selama kehamilan minimal 90 Tablet	90%
11	Persentase Ibu Hamil memiliki Buku KIA	100%
12	Persentase ibu hamil mengikuti kelas ibu minimal 4 kali	80%
13	Persentase Ibu hamil komplikasi (preeklampsia, obesitas, anemia, KEK, pendarahan, jantung, infeksi)	20%
14	Persentase Ibu hamil komplikasi dirujuk ke rumah sakit (preeklampsia, obesitas, anemia, KEK, pendarahan, jantung, infeksi)	95%
15	Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan	95%
16	Persentase ibu hamil anemia	33%
17	Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan imunisasi Td	90%
18	Persentase Ibu Nifas mendapat pelayanan nifas lengkap 4 kali KF4	95%
19	Cakupan Ibu Nifas mendapat kapsul vitamin A	82%
20	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	70%
21	Persentase bayi dengan BBLR (berat badan	2,5%
22	Persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (KN lengkap)	95%
23	Persentase Bayi Baru Lahir yang dilakukan SHK	60%
24	Persentase Bayi Baru Lahir positif Hipotiroid Kongenital	0,03%
25	Persentase Bayi Baru Lahir positif Hipotiroid Kongenital yang mendapat terapi	100%
26	Prevalensi balita stunting (pendek dan sangat pendek)	14%
27	Prevalensi balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk)	7%
28	Prevalensi balita underweight (berat badan kurang dan sangat kurang)	12%
29	Prevalensi balita overweight (gizi lebih dan obesitas)	2,5%
30	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	80%
31	Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif	80%
32	Persentase anak 6-23 bulan mendapatkan MPASI	80%
33	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	85%
34	Cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	90%
35	Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S)	85%
36	Cakupan balita memiliki buku KIA/KMS (K/S)	85%
37	Cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D)	88%

38	Persentase balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90%
39	Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	90%
40	Persentase balita berat badan tidak naik (T) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	60%
41	Persentase balita berat badan kurang (BGM) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	60%
42	Cakupan balita dilayani SDIDTK	85%
43	Cakupan balita dilayani MTBS	85%
44	Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	90%
45	Persentase Remaja putri yang di skrining anemia	90%
46	Persentase Remaja putri anemia	28%
47	Persentase anak usia sekolah mendapatkan penjangkaran kesehatan	90%
48	Cakupan Rumah Tangga Mengonsumsi Garam Beriodium	90%
49	Persentase sekolah melaksanakan UKS/M	70%
50	Persentase sekolah mendapatkan penjangkaran kesehatan	90%
51	Persentase sekolah mendapatkan skrining anemia	55%
52	Persentase sekolah melakukan Aksi Bergizi	75%
53	Jumlah Posyandu Mempunyai Alat Antropometri Sesuai Standar	100%
54	Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan ke sekolah 4 kali setahun melalui UKS/M	90%
55	Persentase Puskesmas memiliki Hb meter	100%
56	Jumlah Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Balita	75%
57	Persentase Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita	100%
58	Persentase Puskesmas Melaksanakan Pendekatan MTBS	100%
59	Jumlah Puskesmas Memiliki Alat Antropometri Sesuai Standar	100%
60	Persentase Puskesmas Melaksanakan SDIDTK	100%
61	Persentase Puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)	80%
62	Standar Pelayanan Hipertensi	100 %
63	Standar Pelayanan Diabetes Melitus	100 %
64	Standar Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa	100 %
65	Standar Pelayanan pada Usia Produktif	100 %
66	Standar Pelayanan IVA Test	75 %
67	Standar Pelayanan TB	100 %
68	Standar Pelayanan HIV	100 %
69	Standar Pelayanan UCI	95 %
70	Standar Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap	95 %
71	Standar Pelayanan Diare	100 %
72	Standar Pelayanan DBD <10/100.000 Penduduk	100 %
73	Standar Pelayanan Malaria	
	1. Cakupan Api	< 1 %
	2. Aber	>10% jmlh pddk
	3. Spr	<5% jmlh slide diperiksa
74	Standar Pelayanan Penanganan dan penanggulangan KLB	100 %
75	Standar Pelayanan Penemuan Kasus AFP/ tahun	≤ 2 kasus
76	Standar Pelayanan PHN	85 %
77	Standar Pelayanan Gigi Mulut	75 %
78	Standar Pelayanan Batra	50 %
79	Standar Pelayanan Indeks Keluarga Sehat (IKS)	80 %
80	Laporan POR yang Masuk	100 %
81	Laporan PIO yang Masuk	100 %

82	Standar Pelayanan Indikator Program POR (Penggunaan Obat Rasional)	
	a. Antibiotik pada Ispa non pneumonia	$\leq 20 \%$
	b. Antibiotik pada diare non spesifik	$\leq 8 \%$
	c. Rerata jumlah obat/ resep	≤ 2.6 item
83	Standar Pelayanan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	50 %
84	Standar Pelayanan Penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	65 %
109	Standar Pelayanan Puskesmas Yang melaksanakan PIO Terdokumentasi	75 %
110	Standar Pelayanan Sarana Apotek yang melapobr SIPNAP	100 %

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MERANGIN



drg. H. SONY PROPESMA, M.Ph